

## Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Sigid Wahyudi<sup>1</sup>, Nadia Agista Al Vionita<sup>2</sup>, Nur Fitriyani<sup>3</sup>, Yusuf Adam Hilman<sup>4\*</sup>

<sup>1234</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

<sup>1234</sup> Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

email: sigitwahyudi.kun@gmail.com<sup>1</sup>, nadiaagista22@gmail.com<sup>2</sup>, cahayafitriyani84@gmail.com<sup>3</sup>, adam\_hilman@umpo.ac.id<sup>4\*</sup>

### Abstract

This study aims to analyze the human resource needs in the Bulak Village Government, Balong District, Ponorogo Regency which will affect the performance of village officials in carrying out their duties. This study uses a qualitative research approach. The data used are primary data in the form of observation and interview results and secondary data. The informants used are the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Kaur and Village Section Head. The analysis method used is a qualitative method with the following stages: (1) data collection; (2) data analysis; (3) data presentation; (4) drawing conclusions. The results of the study indicate that village officials aged 51-55 years are 30% of the total village officials totaling 10 people. 70% of village officials are high school graduates/equivalent and the rest are D3 and S1. In addition, in terms of skills, village officials have difficulty in managing village archives and managing village administration. This is due to insufficient knowledge or basic skills in operating computers. The results of the interview proved that village officials stated that there were many difficulties in efforts to keep up with technological developments that caused disruption to performance. To overcome this problem, action is needed to replace village devices that are no longer in accordance with applicable regulations, with the aim of finding devices that are in accordance with the needs of the institution. In addition, there are several recommendations from the village government to improve the skills of village officials by adding additional skill updates.

**Keywords:** Village Apparatus; Good Governance; Human Resources; Performance;

### Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis kebutuhan SDM di Pemerintah Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo yang akan mempengaruhi kinerja aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara dan data sekunder. Informan yang digunakan adalah Kepala Desa, Sekretaris desa, Bendahara Desa, Kaur serta Kasi Desa. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: (1) pengumpulan data; (2) analisis data; (3) penyajian data; (4) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa yang berusia 51-55 tahun sebanyak 30% dari keseluruhan perangkat desa yang berjumlah 10 orang. Sebesar 70% perangkat desa lulusan SLTA/ sederajat dan sisanya D3 dan S1. Selain itu dari segi keterampilan perangkat desa mengalami kesulitan dalam hal mengelola arsip desa dan pengelolaan administrasi desa. Hal itu disebabkan belum cukupnya pengetahuan atau keterampilan dasar dalam pengoperasian komputer. Hasil wawancara membuktikan bahwa perangkat desa menyatakan bahwa ada banyak kesulitan dalam upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi yang menyebabkan gangguan pada kinerja. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan untuk mengganti perangkat desa yang sudah tidak lagi sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tujuan untuk menemukan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan lembaga. Selain itu, ada beberapa rekomendasi dari pemerintah desa untuk meningkatkan keterampilan aparat desa dengan cara menambah update tambahan keterampilan.

**Keywords:** Perangkat Desa; Good Governance; Sumber Daya Manusia; Kinerja;

\*)Penulis Korespondensi

E-mail : adam\_hilman@umpo.ac.id

### Pembahasan

Pasca munculnya undang-undang tentang pemerintahan desa, berbagai gejolak terjadi di kawasan pedesaan, bukan hanya soal anggaran atau dana desa yang di peroleh, melainkan bagaimana bentuk-bentuk transformasi yang menuntut efektifitas dan optimalisasi fungsi dan juga peran dari kelembagaan desa, hal ini yang kemudian mengharuskan pola kelembagaan lama dari sebuah desa harus berubah dan mampu menjawab tantangan saat ini.

Sumber daya manusia adalah salah satu sektor penting yang harus di kembangkan, kita tau sendiri corak lama pemerintahan desa telah lama mewarnai perjalanan pemerintahan kita, sehingga perlu adanya penataan bagaimana SDM yang sudah terlalu lama menjadi aparatur desa, memerlukan peremajaan melalui penataan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kondisi SDM yang ada di desa bulak kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah salah satu contoh tentang kondisi SDM di level pemerintahan desa yang perlu

penataan dan juga perencanaan yang baik, sehingga penting untuk memperkuat hal tersebut.

## **Metode**

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder, kajian ini berusaha untuk melakukan pemetaan dan analisis terkait penataan SDM yang ada di pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer, yang akan di uji keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber (Hilman, Y. A., & Setyaningsih, A. 2022).

## **Hasil dan Pembahasan**

Kajian ini hendak melihat sejauhmana pemetaan dan analisis SDM Pemerintahan bisa dilakukan, tentunya kita perlu mencermati regulasi dan kebijakan yang ada sebagai landasan, dalam UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa di sana di jelaskan terkait beberapa komponen pemetaan dan analisis SDM (Sumber Daya Manusia) perangkat desa meliputi:

1. Pemetaan jumlah dan jenis kependudukan di desa, termasuk data demografi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status perkawinan.
2. Analisis kompetensi perangkat desa, termasuk kualifikasi akademik, pelatihan, dan pengalaman kerja.
3. Pemetaan kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan kompetensi perangkat desa.
4. Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa.
5. Identifikasi masalah yang dihadapi perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Penyusunan rencana aksi untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dan pengembangan kompetensi perangkat desa.

## **Tingkat Pendidikan Aparatur Desa**

Tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja perangkat desa dalam beberapa cara. Pertama, individu yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung lebih memahami dan memiliki keterampilan dalam mengelola pemerintahan desa, seperti pengelolaan keuangan dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Kedua, individu yang berpendidikan tinggi cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan inovasi, yang dapat membantu perangkat desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa pendidikan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kinerja perangkat desa, masih banyak faktor lain yang mempengaruhi.

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Tingkat pendidikan mampu meningkatkan kinerja perangkat desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan yang menunjukkan bahwa Sedangkan tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, SLTP, SLTA sampai Perguruan Tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga kinerja pegawai tersebut. Pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan formal maupun informal yang lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas.

Kantor Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan kewenangan yang diberikan oleh daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Tugas pokok dan fungsi dari instansi tersebut adalah melayani masyarakat desa, mulai dari urusan surat menyurat hingga pengembangan wilayah desa. Dari segi aparatur, perangkat desa yang bertugas pada Kantor Desa berjumlah 10 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTA, D3, dan Sarjana.

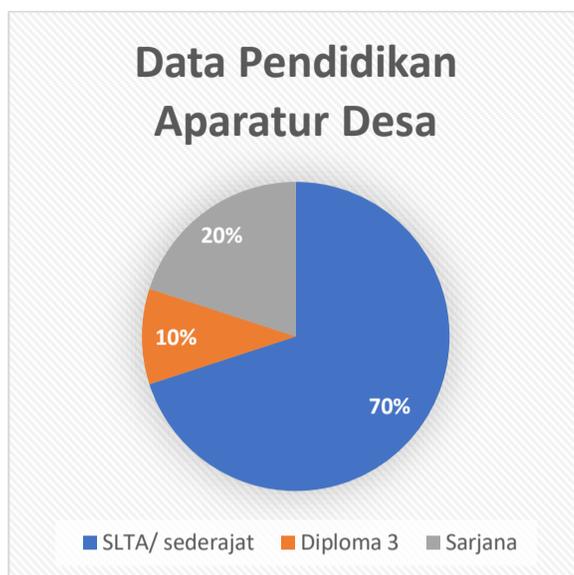


Diagram 1. Data Pendidikan Aparatur Desa  
Sumber: Diolah dari data Desa

### Tingkat Usia Perangkat Desa

Beberapa studi menunjukkan bahwa perangkat desa yang lebih muda cenderung lebih inovatif dan berorientasi pada teknologi, sementara perangkat desa yang lebih tua cenderung lebih stabil dan berorientasi pada tradisi. Namun, ini tidak berlaku untuk semua kasus dan selalu tergantung pada individu.

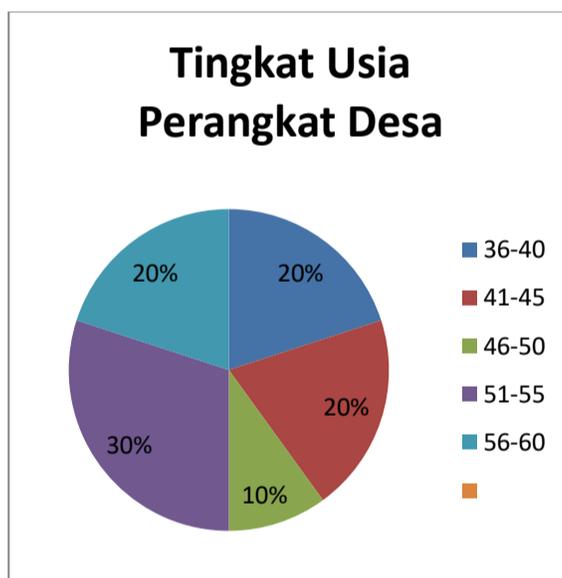


Diagram 2. Data Usia Aparatur Desa  
Sumber: Diolah dari data Desa

Dilihat dari tabel diatas jika usia yang mendominasi perangkat desa dengan presentase 30% pada usia 51-55 tahun ke atas dan masih ditemukan aparatur desa dengan usia diatas 55 tahun dengan presentase tinggi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembaharuan perangkat desa masih sangat rendah atau regenerasi pada saat ini belum banyak dari kalangan usia muda.

Secara filosofis semua orang berhak untuk tidak dibatasi dalam mendapatkan pekerjaan guna penghidupan yang layak, dalam hal ini pemerintah sudah semestinya membuka akses berbagai kemungkinan bagi warganya untuk dapat bekerja termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai perangkat desa. Sedangkan secara sosiologis di mana realitas menunjukkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan secara luas bagi warga negaranya. Merujuk pada ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a menjelaskan bahwa masa jabatan

perangkat desa tidak lagi berdasarkan periode melainkan berdasarkan usia, yakni perangkat desa diberhentikan manakala usia telah genap 60 (enam puluh) tahun. Dengan kata lain manakala perangkat desa yang belum genap berusia 60 (enam puluh) tahun maka perangkat desa belum dapat diberhentikan. Hal ini juga menegaskan adanya pembatasan atau tidak memberikan kesempatan yang sama kepada siapa saja yang meskipun orang tersebut masih dalam usia produktif dan berniat untuk menjadi perangkat desa manakala perangkat desa yang ada masih berusia di bawah 60 (enam puluh) tahun.

### **Tingkat Keterampilan Perangkat Desa**

Bekal kemampuan menggunakan dan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor kunci untuk mengejar ketertinggalan SDM Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Hal itu mengisyaratkan bahwa kepada seluruh masyarakat Indonesia perlu disediakan pengalaman yang cukup dalam memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi khususnya komputer sebagai bekal kemampuan dasar untuk dapat memecahkan aneka masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Pada kenyataannya, keterampilan dasar komputer belum bisa menjangkau semua masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan. Hal itu disebabkan kurang adanya orang yang mampu mengajarkan materi tersebut. Padahal, keberadaan teknologi informasi dan internet menjadi penting dalam upaya mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan disetiap lapisan. Hal itu menjadi sangat urgent seiring mulai diterapkannya sistem pengolahan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government, termasuk pemerintahan desa.

Pemerintah Desa (Pemdes) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa bagaimana diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintahan desa dilengkapi kelengkapan struktur organisasi yang didalamnya terdapat tugas dan fungsi yang melekat. Hal itu bertujuan agar setiap perangkat dapat melaksanakan fungsi-fungsi organisasi pemerintahan desa, yang juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja maksimal yang dihasilkan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan akan sangat bergantung pada keterampilan dan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan program-program dan pengelolaan dana yang telah direncanakan.

Keterampilan dasar komputer adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi keterampilan penting yang diperlukan untuk memanfaatkan komputer. Lingkup keterampilan yang dianggap dasar memang bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Misalnya, untuk pemerintah desa dapat mempertimbangkan kemampuan untuk menggunakan jenis perangkat lunak pengolah kata seperti (Microsoft Office Word) untuk menjadi salah satu keterampilan dasar yang diperlukan, sementara pemerintah desa yang ditugaskan sebagai bendahara atau yang mengelola keuangan desa akan lebih menekankan pada kemampuan untuk bekerja dengan spreadsheet atau Microsoft Office Excel.

Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah dusun dan masyarakat yang cukup banyak. Untuk itu, pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa penting untuk diwujudkan. Dengan demikian, keterampilan dasar TIK sangat diperlukan. Pemerintah desa Bulak, masih kurang memanfaatkan teknologi komputer ini untuk mengelola arsip desa dan pengelolaan dana desa.



Diagram 3. Data Keterampilan Aparatur Desa  
Sumber: Diolah dari data Desa

### Kesimpulan

Tingkat pendidikan rendah dapat mempengaruhi kinerja perangkat desa dalam beberapa cara. Beberapa studi menunjukkan bahwa perangkat desa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih efektif dalam mengelola sumber daya desa dan menyelesaikan masalah yang dihadapi desa. Mereka juga cenderung lebih mampu mengikuti perkembangan teknologi dan peraturan pemerintah. Namun, tingkat pendidikan tidak selalu menentukan kinerja perangkat desa, karena faktor-faktor seperti pengalaman, keterampilan, dan motivasi juga penting. Selain itu Tingkat pendidikan rendah di perangkat desa dapat mempengaruhi aspek dalam pengelolaan desa, diantaranya :

1. Kemampuan dalam mengelola sumber daya desa: Perangkat desa dengan tingkat pendidikan rendah mungkin kurang mampu dalam mengelola sumber daya desa seperti lahan, air, dan sumber daya manusia.
2. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah desa: Perangkat desa dengan tingkat pendidikan rendah mungkin kurang mampu dalam menyelesaikan masalah desa seperti pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas.
3. Kemampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi dan peraturan pemerintah: Perangkat desa dengan tingkat pendidikan rendah mungkin kurang mampu dalam mengikuti perkembangan teknologi dan peraturan pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan desa.
4. Kemampuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat: Perangkat desa dengan tingkat pendidikan rendah mungkin kurang mampu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa.

Tingkat usia di perangkat desa dapat mempengaruhi beberapa aspek dalam pengelolaan desa, diantaranya: 1). Pengalaman: Perangkat desa yang lebih tua cenderung memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mengelola desa dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. 2). Keterampilan: Perangkat desa yang lebih tua cenderung memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengelola desa dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. 3). Orientasi: Perangkat desa yang lebih tua cenderung lebih berorientasi pada tradisi dan lebih stabil dalam mengelola desa. 4). Kesehatan: Perangkat desa yang lebih tua mungkin kurang sehat, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam mengelola desa. 5). Inovasi: Perangkat desa yang lebih tua mungkin kurang inovatif dalam mengelola desa.

Namun, ini tidak berlaku untuk semua kasus dan selalu tergantung pada individu. Semua itu tidak selalu berlaku untuk semua kasus dan selalu tergantung pada individu. Tingkat keterampilan di perangkat desa ditemukan bahwa perangkat desa mengalami kesulitan dalam hal mengelola arsip desa dan pengelolaan administrasi desa. Hal itu disebabkan belum cukupnya pengetahuan atau keterampilan dasar dalam pengoperasian komputer. Permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : a). Para

perangkat desa belum pernah mengikuti pelatihan komputer karena belum ada upaya yang dilakukan dalam hal pelatihan komputer, b). Para perangkat desa jarang menggunakan komputer dalam hal pengarsipan file dan pengurusan administrasi keuangan, c). Terbatasnya peralatan komputer di desa.

### **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas bantuan dan dukungan terhadap penyelesaian artikel ini.

### **Daftar Pustaka**

- Ariono, I. (2017). analisa pengaruh tingkat pendidikan, masa kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja perangkat desa di kecamatan Kaliwiro Wonosobo. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3), 254-267.
- Hilman, Y. A., & Setyaningsih, A. (2022). The Role of The Village Administration in The Management of Tourist Village in Pacitan Regency. *MAJAPAHIT POLICY*, 2(2).
- Kusuma, M. (2022). Pengaruh Kompetensi, Tingkat Pendidikan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. *JISEB: Journal Innovation of Social, Economy, and Business*, 1(1).
- Marryono, Y. J. (2019). Pelatihan Keterampilan Dasar Komputer Dan Teknologi Informasi Bagi Perangkat Desa Pong Lengor, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Volume 2, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 89-178.
- Setyawan, M. D., Sabtohadhi, J., & Suhartono, H. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Perangkat Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Indonesia*, 18(1).
- Setyawati, N., & Tahwin, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. *BBM (Buletin Bisnis & Manajemen)*, 7(2), 139-149.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Zainul Fikri, T. I. (2022). Kajian Yuridis Batas Usia Berakhirnya Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 2917-2919.